

PENGELOLAAN DANA TIYUH PADA PENGEMBANGAN EKONOMI MASYARAKAT DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

Yohanes¹, Hasan Mukmin², Fitri Yanti³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

email:yohanestb1@gmail.com¹, hasanmukmin@radenintan.ac.id², fitriyanti@radenintan.ac.id³

Abstrak

BUMDesa merupakan pilar kegiatan Ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Pembangunan pada sektor Ekonomi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan Tiyuh di Tulang Bawang Barat mengembangkan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTi), diharapkan lembaga dapat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi untuk mencapai masyarakat sejahtera dan mandiri, sekaligus upaya Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat. Penelitian bertujuan mendeskripsikan proses pengelolaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan dan dampak ekonomi bagi masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Didalam kegiatan pengelolaannya terdapat tahapan yang pada kenyataannya tidak terealisasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, dengan mengambil latar di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Populasi penelitian adalah pengurus BUMTi Gunung Katun Tanjungan dan masyarakat iyuh Gunung Katun Tanjungan yang berjumlah 1.870 orang dengan menggunakan teknik *Purposive Sampling* sehingga terdapat kriteria dalam menentukan sampel. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian adalah observasi, interview dan dokumentasi. Metode deskriptif analisis digunakan untuk menghimpun data aktual. Berdasarkan hasil penelitian dengan kegiatan yang dilakukan oleh BUMTi Gunung Katun Tanjungan, semua kegiatan berjalan dan adapun kegiatan yang terlaksanan tetapi tidak berjalan lancar pula. Hasil yang diperoleh tidak menimbulkan peningkatan ekonomi bagi masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

Kata kunci: Pembangunan Ekonomi, Badan Usaha Milik Desa, Kelompok Tani, Peningkatan Ekonomi, Pendapatan

Abstract

BUMDesa is a pillar of economic activities in villages that function as social institutions and commercial institutions. BUMDesa as a social institution sides with the interests of the community through its contribution in the provision of social services. Development in the Community Economic sector, District Government and Tiyuh in Tulang Bawang Barat develop activities including Tiyuh Owned Enterprises (BUMTi), it is hoped that institutions can help the community in economic improvement to achieve a prosperous and independent community, as well as efforts to develop Community Economic Empowerment in the West Tulang Bawang Regency area. The research aims to describe the management process of Gunung Katun Tanjungan BUMTi and the economic impact on the Tiyuh community of Gunung Katun Tanjungan. In its management activities, there are stages that in reality are not realized This research uses a qualitative type of research, taking the background of Tiyuh Gunung Katun Allowance. The study population was the management of Gunung Katun Taanjungan BUMTi and the Gunung Katun Tanjungan community which amounted to 1,870 people using Purposive Sampling techniques so that there were criteria in determining samples. The authors used the data collection methods in the study were observation, interviews, and documentation. The descriptive method of analysis is used to collect actual data. Based on the results of research with activities carried out by BUMTi Gunung Katun Tanjungan, all activities are running, and some activities are carried out but do not run smoothly either. The results obtained did not cause economic improvement for the Tiyuh community of Mount Katun Tanjungan.

Keywords: Economic Development, Village-Owned Enterprises, Farmer Groups, Economic Improvement, Income

PENDAHULUAN

Pembangunan Nasional yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam sektor perekonomian dalam berbagai hal adalah upaya untuk menumbuh kembangkan perokonomian Nasional agar menjadi

sebuah ketahanan perekonomian Nasional(Wicaksana, 2021), ketahanan perekonomian nasional tidak terlepas dari mata rantai ketahanan ekonomi masyarakat oleh karena itu perlu terlebih dahulu mengutamakan ketahanan dari perekonomian masyarakat, upaya pemerintah ini sudah dilakukan dalam berbagai cara agar masyarakat dapat sejahtera.

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator penting untuk menilai keberhasilan pembangunan ekonomi yang telah dilaksanakan oleh suatu negara. Pada negara-negara kesejahteraan (*welfare state*) dan biasanya sudah maju, pertumbuhan ekonomi dianggap sebagai solusi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pembangunan seperti kemiskinan, buruknya kesehatan dan pendidikan, serta krisis kemanusiaan(Halim, Abdul. 2020). Kebijakan pembangunan yang berorientasi pada pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) tersebut biasanya hanya terfokus pada peningkatan produktivitas kegiatan perekonomian yang diukur melalui **Gross Domestic Product (GDP)** , dan cenderung mengabaikan dimensi sosial serta budaya masyarakat.(Sriyana, 2020) Upaya Pemberdayaan Masyarakat agar masyarakat dapat berperan aktif dalam setiap proses pembangunan daerah dalam ikatan Negara Kesan Republik Indonesia, hal ini juga terkait dengan paradigma baru pemerintahan, yang tidak lagi dominan melaksanakan proses pembangunan namun hanya bersifat katalisator dan fasilitator dalam proses pembangunan.(Handono et al., 2020)

Lahirnya Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa¹ ini sebuah langkah strategis untuk mempermanenkan sistem atau pola pembangunan yang ada di Desa dan keberadaan Undang Undang Desa merupakan sesuatu hal yang baru karena bagi desa dengan adanya Undang Undang Desa yang didampingi oleh Dana diberikan kepada Desa-desa sebagai dana stimulus dan ini diharapkan akan dapat lebih mempercepat proses pembangunan dan peningkan ekonomi masyarakat sehingga masyarakat dapat lebih mandiri dan Sejahtera

BUM Desa merupakan pilar kegiatan Ekonomi di Desa yang berfungsi sebagai lembaga sosial (*social institution*) dan komersial (*commercial institution*). (Najati, 2021) BUMDesa sebagai lembaga sosial berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial. Sedangkan sebagai lembaga komersial bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) ke pasar.

Agar kegiatan yang dilaksanakan ditingkat desa bisa selaras dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan supaya semua pelaku yang ada di desa baik pemerintah desa dan masyarakat dapat melaksanakan kegiatan tersebut sehingga mempunyai hasil yang berkualitas, maka Pemerintah Pusat membuat Program Pendampingan dalam bentuk Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) dan Program Inovasi Desa (PID).

Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) dan Program Inovasi Desa (PID). yang dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT), Program-Program Pendampingan yang ada dengan keberadaannya mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa, sebagaimana dikenal Pelaku Pendampingan di Kabupaten yaitu Tenaga Ahli, di Kecamatan Pendamping Desa (PD), sedangkan di Desa Pendamping Lokal Desa (PLD), para pelaku ini diharapkan agar dapat memberikan pendampingan pada Desa dalam mengelola dana desa dan memberikan solusi dari masalah-masalah yang ada didesa sehingga masyarakat dapat lebih berkembang menjadi mandiri dan sejahtera.

Kabupaten Tulang Bawang Barat merupakan salah satu kabupaten yang ada di Indonesia sesuai dengan Pembentukan Kabupaten yaitu pemekaran dari Kabupaten Tulang Bawang yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Penyebutan Desa di Kabupaten Tulang Bwang Barat semula sesuai dengan Kabupaten induk yaitu Kabupaten Tulang Bawang dengan sebutan Kampung. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiuh di Kabupaten Tulang Bawang Barat, oleh karena itu semula sebutan Kampung berubah menjadi Tiuh.

Kabupaten Tulang Bawang Barat, jauh sebelum pemekaran sama halnya dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia telah menerima program-program pemberdayaan dari pemerintah pusat seperti program-program yang telah di uraikan diatas, yaitu Inpres Desa Tertinggal (IDT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) kemudian ditetapkan Program Pemberdayaan menjadi Program Nasional yang di kenal dengan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Sampai dengan adanya Dana Desa (DD) sekaligus dengan pendampingan dalam pelaksanaannya, namun sepertinya

tidak banyak membawa pengaruh kemajuan pada Tiyuh non transmigrasi yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat khususnya dibidang Peningkatan Ekonomi Masyarakat.

Pembangunan pada sektor Ekonomi Masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan Tiyuh di Tulang Bawang Barat mengembangkan kegiatan-kegiatan diantaranya adalah Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTi), diharapkan dari lembaga ini dapat membantu masyarakat dalam peningkatan ekonomi untuk mencapai masyarakat yang sejahtera dan mandiri, ini sekaligus upaya dalam Pengembangan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di wilayah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Kegiatan Lembaga Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTi), yang ada mengalami dinamika dalam pengelolaan ini terlihat dari data laporan Tenaga Ahli Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat (P3MD) dari total 93 Tiyuh yang memiliki Lembaga Badan Usaha Milik Tiyuh 85 yang aktif dan 8 BUMTi yang tidak aktif, kemudian dari jumlah unit usaha yang ada, Aktif : 117 kegiatan, dan Tidak Aktif ; 30 kegiatan.

Melihat gambaran persoalan dalam perkembangan kelembagaan ekonomi yaitu pada Badan Usaha Milik Tiyuh dan unit usaha ada kevakuman atau tidak aktif, maka perlu upaya yang lebih konkrit agar dalam proses pengembangan ekonomi melalui lembaga Badan Usaha Milik Tiyuh agar lebih terarah, dengan harapan pemerataan ekonomi lebih cepat dapat tercapai, ini dalam rangka mengantisipasi kesenjangan sosial antar Tiyuh yang ada di Kabupaten Tulang Bawang Barat.

METODE

Dalam penelitian ini, yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan sifat penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena, yaitu dengan menjelaskan ataupun menerangkan sebuah peristiwa.(Sari et al., 2022) Dalam penelitian ini metode sampling penulis gunakan adalah *purposive sampling* dengan jenis *maximum variation sampling* yaitu menentukan sample dengan pertimbangan tertentu yang dianggap dapat memberikan data secara maksimal sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek yang diteliti. Pada teknik ini informan ditentukan oleh pertimbangan-pertimbangan informasi yang diperlukan dan jika tidak ada lagi informasi yang dapat dijangkau, maka penarikan informan sudah dapat diakhiri. Data yang bersumber dari data primer dan data sekunder, dengan tehnik pengumpulan data interview, observasi, dan dokumentasi, serta analisis data dengan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemerintah Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik mendirikan Badan Usaha Milik Tiyuh dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat Tiyuh sesuai dengan kebutuhan dan potensi Tiyuh. Lembaga ini bernama Badan Usah Milik Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. BUMTi berkedudukan di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik Kabupaten Tulang Bawabg Barat Provinsi Lampung. Daerah kerja BUMTi berada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan Kecamatan Tulang Bawang Udik, Kabupaten Tulang Bawabg Barat.

BUMTi Gunung Katun Tanjungan berbentuk Badan Usaha yang dilegalisasi melalui Peraturan Tiyuh. BUMTi Gunung Katun Tanjungan berfungsi sebagai Lembaga Ekonomi Tiyuh yang mengembangkan usaha dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya rumah tangga miskin Tiyuh Gunung Katun Tanjungan, Kecamatan tulang Bawang Udik.

BUMTi Gunung Katun Tanjungan adalah badan usaha milik Tiyuh yang dimiliki oleh pemerintah Tiyuh dan masyarakat dengan komposisi kepemilikan mayoritas oleh pemerintah Tiyuh. Yang dimaksud dengan masyarkat pada awal pendirian BUMTi Gunung Katun Tanjungan adalah masyarakat Tiyuh Gunung Katun tanjungan, Kecamatan Tulang Bawang Udik. Dalam perkembangannya masyarakat dapat berperan dalam kepemilikan BUMTi Gunung Katun Tanjungan melalui penyertaan modal.

1. Unit Kegiatan usaha BUMTi Gunung Katun Tanjungan

Unit usaha sewa yang dijalankan oleh BUMTi Gunung Katun Tanjungan dalam bidang peminjaman. Dimana pemerintah memberikan pinjaman fasilitas kepada masyarakat untuk mempermudah masyarakat dalam mengadakan kegiatan yang mengaruskan menggunakan tarup. Dalam kegiatan usaha ini penyewa mengaruskan membayar biaya sewa yang ditarifkan perhari dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. BUMTi yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pendapatan desa.

Contoh jenis usaha Renting yaitu: penyewaan Tarup (tenda). Di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan jenis usaha BUMTi model Renting sudah diterapkan, adapun jenis penyewaan yang dikelola BUMTi ialah penyewaan peralatan berupa tarub. Untuk penyewaan 1 unit tarub sebesar Rp 300.000 per hari.

2. Pengelolaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan Yang Dilakukan Oleh Pemerintah Tiyuh

a. Perencanaan (*Planning*)

Perencanaan adalah proses penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai suatu hasil (Jonathan, 2017). Perencanaan dalam sebuah organisasi sangat dibutuhkan karena dengan adanya perencanaan maka sebuah organisasi bisa berjalan dengan baik. Berjalannya BUMTi Gunung Katun Tanjungan, tentunya memiliki Strategi perencanaan yang baik sehingga bisa memiliki berbagai unit usaha yang sudah berkembang. Sebuah organisasi tentu memerlukan tujuan, dan untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya harus menggunakan strategi. Strategi yang dimaksud ialah tujuan jangka panjang yang ingin dicapai oleh BUMTi Gunung Katun Tanjungan. Strategi yang dapat berupa tindakan yang ingin diputuskan oleh Direktur dengan menggunakan banyak sumber daya atau masyarakat desa.

Dalam proses berorganisasi seharusnya ada prosedur yang jelas dan baik dalam menjalankan programnya ataupun prosedur lainnya yang bersangkutan dengan organisasi tersebut agar organisasi tersebut mempunyai aturan didalam melaksanakan program. Prosedur dalam BUMTi Gunung Katun Tanjungan sudah ada prosedurnya yaitu prosedur dalam melakukan pinjaman dan bantuan pada penyewaan tarub tetapi usaha tersebut tidak berjalan sebagaimana yang telah direncanakan.

b. Pengorganisasian (*organizing*)

Pengorganisasian adalah proses menghubungkan orang-orang yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas dan fungsinya dalam organisasi (Sakamatapan et al., 2021). Dalam proses pengorganisasian dilakukan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab secara terperinci berdasarkan bagian dan bidangnya masing-masing untuk mencapai tujuan yang telah di sepakati bersama.

BUMTi Gunung Katun Tanjungan sudah memiliki struktur pengorganisasian yang sudah di bentuk, masing-masing anggota memiliki tugas, wewenang, dan fungsinya berdasarkan bidangnya masing-masing, dan meskipun sudah terbentuk masing-masing anggota setiap unitnya, semua anggota tetap bekerja sama saling membantu. Pengorganisasian bertujuan untuk membentuk unit-unit kerja yang terorganisir untuk mencapai tujuan usaha. Dengan pengorganisasian maka akan memperjelas deskripsi kerja, pengukuran kerja dan pencapaian kerja. Tanpa pengorganisasian suatu organisasi sulit berjalan dan dipertanggungjawabkan, Karena jika ada masalah tidak tahu siapa yang bertanggung jawab, dan jika tidak terselesaikan akan saling menyalahkan diantara satu dengan yang lain.

Pengorganisasian merupakan hal yang penting dalam BUMTi Gunung Katun Tanjungan karena dengan pengorganisasian dapat mengumpulkan orang-orang dan menempatkan mereka menurut kemampuan dan keahliannya dalam suatu pekerjaan yang sudah direncanakan. Dalam suatu pengorganisasian dibutuhkan adanya pembagian kerja serta penempatan tugas yang diharapkan, sehingga pekerjaan akan dilaksanakan akan berjalan secara efektif dan efisien. Dalam BUMTi Gunung Katun Tanjungan sudah dilakukan penempatan tugas dan fungsi yang sesuai dengan bidang keahliannya masing-masing sehingga para pengurus sudah mengetahui tugas dan perannya masing-masing sehingga tidak terjadi tumpang tindih didalam pekerjaannya. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penempatan tugas dan fungsi BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak mengetahui tugasnya masing-masing dan kurangnya pengurus sehingga banyak kendala di saat menjalankan tugas dan ada beberapa pengurus yang sudah tahu tugasnya tapi karena ada pekerjaan sampingan di luar sehingga tugasnya sebagai pengurus tidak dilaksanakan. Keterlibatan pengurus dalam menjalankan tugas dan fungsi adalah bagian yang sangat diperlukan untuk menunjang kesuksesan BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

Selain dengan melakukan pembagian tugas, penetapan wewenang juga membuat pengurus bisa melaksanakan tugasnya dengan baik tanpa ada intimidasi dari internal organisasi maupun dari external organisasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan yaitu para pengurus tidak mempunyai wewenang untuk melindungi usaha desa terhadap hal-hal yang dapat merusak kelangsungan BUMTi Gunung Katun Tanjungan serta pemerintah Tiyuh bahkan masyarakat

juga tidak dapat meminta penjelasan mengenai segala persoalan yang menyangkut usaha yang ada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

c. Penggerakan (*Actuating*)

Penggerakan adalah membangkitkan dan mendorong semua anggota kelompok agar berkehendak dan berusaha dengan ikhlas serta serasi dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan untuk menggerakkan anggota yang telah diberikan tugas untuk menjalankan tugasnya. Dalam hal menggerakkan anggota, maka yang bertanggung jawab penuh adalah pimpinan. Seorang pemimpin harus bisa mengatur strategi bagaimana anggotanya bisa bergerak aktif dalam menjalankan tugasnya.

Penggerakan dalam BUMTi yang bertanggung jawab penuh adalah seorang direktur yang membuat strategi bagaimana anggotanya bisa bergerak dan aktif dalam organisasi, dalam strategi yang digunakan adalah strategi melakukan pertemuan satu bulan sekali untuk rapat dan acara arisan anggota, dan strategi motivasi dengan komunikasi yang mengikat para anggota untuk bersedia mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta efisien untuk mencapai tujuan. Mempengaruhi dengan memberikan motivasi kepada anggota, dengan komunikasi yang mendorong, komunikasi yang bertanggung jawab, komunikasi yang membujuk atau mengajak, komunikasi yang mencari jalan keluar bukan mencari kesalahan, komunikasi yang tidak meledak-ledak penuh amarah dan emosi, komunikasi berdasar fakta dan data bukan bohong atau manipulasi, dan komunikasi yang berulang-ulang.

Fungsi penggerakan yaitu dengan memberikan bimbingan, saran agar mampu bekerja secara optimal serta memberikan perintah dalam pelaksanaan tugas agar dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dalam hal ini BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak melakukan pembinaan kepada staff tenaga kerja BUMTi Gunung Katun Tanjungan dan tidak mengedukasi masyarakat mengenai peran dan fungsi BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

d. Pengawasan (*controlling*)

Pengawasan merupakan suatu kegiatan manajer yang mengusahakan agar pekerjaan sesuai dengan rencana yang di tetapkan dan mencapai hasil yang dikehendaki. Pengawasan merupakan tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. Pengawasan (*controlling*) merupakan proses pengamatan atau pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

Pengawasan dalam BUMTi Gunung Katun Tanjungan yang pertama strategi yang digunakan adalah kepala unit membuat laporan berjalannya unit usaha dan kondisi unit usaha, dan dilaporkan pada saat pertemuan rapat satu kali dalam sebulan. Kepala dan anggota setiap unit melaporkan bagaimana keadaan dan berjalannya unit yang dikelola, apakah berjalan dengan baik atau tidak, sehingga anggota unit lain juga bisa mendengarkan dan tahu keadaan semua unit. Dan jika ada permasalahan dapat mencari jalan dan solusinya secara bersama. kemudian selain membuat laporan, pengawasan dilakukan seperti yang diungkapkan ketua BUMTi Gunung Katun Tanjungan. Namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan apa yang di strategikan oleh ketua BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Dalam pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan dengan penentuan dan evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja anggota sudah dilakukan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan tersebut. Kegiatan pengawasan secara langsung ini tidak terealisasi dikarenakan kurangnya tanggung jawab dari pihak BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

Ada tiga tahap dalam pengawasan yaitu menetapkan standar, melakukan penilaian dan mengadakan tindakan perbaikan. Indikator- indikator pengawasan adalah sebagai berikut:

1) Menetapkan alat ukur serta melakukan penilaian.

Dalam melakukan pengawasan maka harus ada standar yang harus ditetapkan sehingga dapat menilai apa yang terjadi di lapangan. Standar ini sebagai ketentuan yang harus berlaku dan harus diikuti, sebab ketentuan dari standar yang ada akan dilakukan penilaian oleh pihak pengawasan dan hasil pengawasan tersebut kita akan mengetahui tindakan mana yang salah sehingga akan dilakukan perbaikan. Untuk standar dalam pengawasan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ini, dari pihak pengawas dalam melakukan pengawasan berpanduan pada Peraturan Daerah

Kabupaten Sumbawa Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pembentukan Dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa yang didalamnya telah memuat pengawasan di dalam BUMDes ini, pengawasan yang dilakukan setiap enam bulan sekali terhadap BUMDes. Dalam tahapan ini BUMTi Gunung Katun Tanjungan belum mampu mencapai standar pengawasan yang telah ditetapkan.

2) Melakukan tindakan perbaikan.

Untuk dapat melaksanakan tindakan perbaikan, maka pertamamata haruslah dianalisis apa yang menyebabkan terjadinya penyimpangan tersebut, harus diketahui lebih dahulu terjadinya penyimpangan tersebut, apabila pimpinan telah dapat menetapkan dengan pasti sebab terjadinya penyimpangan barulah diambil tindakan perbaikan. Dimanapun organisasinya penyimpangan itu pasti ada terjadi, namun bagaimana kita meminimalisir dari penyimpangan tersebut.

Pemilihan dan penentuan jenis usaha yang akan dijadikan unit bisnis BUMDes harus dilakukan dengan seksama dan pertimbangan yang matang. Dalam menyusun rencana kerja BUMDes perlu memperhatikan beberapa inovasi dengan kondisi yang sedang berkembang di masyarakat. Jenis-jenis usaha yang dapat dikembangkan oleh BUMDes harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi di desa serta peluang pasar yang menjanjikan, sehingga unit usaha tersebut mampu memberikan keuntungan bagi BUMTi melalui nilai tambah ekonomi dan pasardari bisnis tersebut. Sama seperti hanya tahapan perencanaan, pada tahapan ini BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak memenuhi kualifikasi dalam kegiatan melakukan tindakan perbaikan. Adapun usaha BUMTi Gunung Katun Tanjungan yang terlaksana meskipun tidak berjalan lancar yaitu system usaha sewa. BUMTi Gunung Katun Tanjungan yang menjalankan bisnis penyewaan untuk melayani kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus untuk memperoleh pedapatan desa. Unit usaha penyewaan (BUMTi Renting) termasuk dalam unit usaha sewa tarub. BUMTi Gunung Katun Tanjungan menjalankan kegiatan usaha penyewaan tidak berjalan lancar. Hal ini disebabkan karena banyak dari anggota masyarakat yang melakukan penyewaan tetapi tidak memenuhi kewajibannya yaitu dengan tidak memnayar biaya sewa kepada BUMTi Gunung Katun Tanjungan sehingga tidak adanya pemasukan bagi BUMTi Gunung Katun Tanjungan. Menjalankan sebuah usaha penyewaan untuk memudahkan semua warga yang mendapatkan berbagai kebutuhan perlengkapan dan peralatan yang dibutuhkannya seperti penyewaan tarub. Berdasarkan analisis di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan yang dilakukan oleh BUMTi Gunung Katun Tanjungan terhadap jenis usaha penyewaan (BUMDes Renting) in tidak berjalan baik. BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak berjalan dengan baik terlihat dari tidak adanya peningkatan pendapatan BUMTi Gunung Katun Tanjungan sendiri. Selain itu, tidak dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan sekaligus tidak dapat memperoleh pendapatan desa. Keberadaan unit usaha ini tidak memudahkan masyarakat dalam mendapatkan berbagai perlengkapan peralatan pertanian. Seharusnya Manfaat dari adanya unit usaha ini adalah ekonomi desa semakin bergairah, pendapatan desa menjadi meningkat serta meningkatkan kinerja pembangunan desa dalam mensejahterahkan masyarakat.

3. Peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat

Badan Usaha Milik Tiyuh (BUMTi) adalah suatu lembaga keuangan yang mana tujuan utamanya adalah untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang membutuhkan untuk menjalankan suatu usahanya, selain itu BUMTi Gunung Katun Tanjungan juga bisa mendirikan usaha-usaha untuk meningkatkan ekonomi masyarakat. Dengan terbentuknya BUMTi Gunung Katun Tanjungan seharusnya diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada masyarakat dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.

Adapun bentuk peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan yang tidak dapat mewujudkan tujuan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat adalah sebagai berikut:

a. Kurang berperan aktif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan dalam memenuhi kebutuhan konsumsi tidak selalu sama. Bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah tentu mereka memiliki tingkat pola konsumsi yang terbatas dikarenakan pendapatannya harus terbagi-bagi dengan pengeluaran untuk pangan, sedangkan untuk yang berpenghasilan sedang tidak semua masyarakat memiliki tingkat pola konsumsi tinggi ada pula yang rendah. Sedangkan pengeluaran untuk pendidikan dan kesehatan juga disesuaikan dengan kemampuan pendapatan masing-masing masyarakat.

Disinilah peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan sangat membantu masyarakat, akan tetapi BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak berperan sebagaimana mestinya sehingga masyarakat tidak mendapatkan peningkatan kualitas hidup.

Tidak terbantu dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari, di BUMTi Gunung Katun Tanjungan juga tidak mengadakan penyuluhan mengatasi pengelolaan usaha masyarakat untuk meningkatkan usaha tersebut agar mengalami peningkatan dari segi kualitas maupun ekonomi. Dari hasil pengamatan peneliti terhadap masyarakat terlihat bahwa BUMTi Gunung Katun Tanjungan ini tidak berperan terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak dapat menambah penghasilan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

- b. Kurang memperkokoh perekonomian masyarakat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan BUMTi Gunung Katun Tanjungan sebagai pondasinya.

BUMTi Gunung Katun Tanjungan seharusnya hadir untuk memperkuat perekonomian masyarakat, agar masyarakat tidak hanya mengandalkan hasil penjualannya. Akan tetapi masyarakat dapat mengembangkan usahanya dengan peminjaman modal dari BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

Dengan tidak adanya peminjaman modal, tidak membantu masyarakat dalam mengembangkan usaha-usahanya. Sehingga tidak terdapat peningkatan hasil penjualan.

- c. Tidak berusaha mewujudkan dan mengembangkan perekonomian masyarakat desa

Peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat, Keberadaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak membantu masyarakat.

Kehadiran BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak memberikan kemudahan bagi masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan dalam peminjaman modal dengan pemberian bunga yang relatif rendah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Tidak hanya itu, ada beberapa masyarakat tetap mengandalkan dirinya untuk bekerja di luar negeri untuk memperoleh penghasilan tambahan untuk keluarganya. BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak menawarkan peminjaman modal kepada masyarakat guna untuk mengembangkan usahanya.

Dengan adanya unit usaha peminjaman modal yang diadakan oleh BUMTi tidak dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usaha masyarakat, banyak dari masyarakat yang tetap meminjam modal ke Bank, rentenir dengan bunga yang lumayan besar. Peran BUMTi tidak dapat dirasakan oleh masyarakat, Keberadaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak membantu masyarakat.

Peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan dirasa masih belum merata, terlihat dari beberapa masyarakat yang masih belum mengetahui unit-unit usaha yang ada di BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

Kurangnya ilmu pengetahuan yang dimiliki masyarakat mengenai BUMTi Gunung Katun Tanjungan maupun unit-unit usaha yang dimilikinya, cukup memberikan bukti bahwa peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan belum bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan.

Dengan adanya peminjaman modal pada BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak dapat membantu masyarakat untuk mengembangkan usahanya, masyarakat tetap meminjam ke Bank dengan proses yang lama dan berbelit-belit. Dan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya unit usaha peminjaman modal di BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

SIMPULAN

Pengelolaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan dalam meningkatkan pendapatan tidak membantu masyarakat setempat khususnya yang berada di Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Pola perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan yang ada di BUMTi., adalah dibuat berdasarkan pemikiran masyarakat dan anggota BUMTi Gunung Katun Tanjungan, kemudian disepakati melalui musyawarah desa, dengan begitu rencana-rencana yang disepakati bersama masuk dalam program perencanaan BUMTi Gunung Katun Tanjungan. Akan tetapi tidak semuanya teralisasi sehingga tidak berdampak positif pada keadaan masyarakat Tiyuh Gunung Katun Tanjungan. Peran BUMTi Gunung Katun Tanjungan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tidak dapat diwujudkan, peranan BUMTi Gunung Katun Tanjungan tidak berhasil diwujudkan dengan adanya unit-unit usaha yang ada didalamnya seperti: unit usaha penyewaan tarup. Tidak terlihat beberapa peningkatan ekonomi masyarakat dikarenakan usaha yang dijalankan oleh BUMTi Gunung Katun Tanjungan.

Tidak ada yang berjalan sesuai perencanaan. Hal ini dikarenakan tidak berperannya BUMti Gunung Katun Tanjungan, dalam menjalankan tujuan dan fungsinya.

SARAN

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya dan menambah wawasan pengetahuan mengenai BUMTI bagi pembaca.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada instansi yang telah memberi dukungan terhadap pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Handono, S. Y., Hidayat, K., & Purnomo, M. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Pertanian. Universitas Brawijaya Press. <https://books.google.co.id/books?id=Lacpeaaaqbaj>
- Jonathan, R. (2017). Manajemen Organisasi Dan Perencanaan Strategis. Nomaden Institute. <https://books.google.co.id/books?id=Kndkeaaaqbaj>
- Najati, F. (2021). Proses Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Rungu Wicara. *Frontiers In Neuroscience*, 14(1), 1–13.
- No Titlehalim, Abdul. 2020. Pengaruh Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mamuju. *Growth: Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan* P-Issn: 2621- 3842, E-Issn: 2716-2443 Volume 1, No. 2, 2020. (N.D.).
- Sakamatapan, K., Mesgarpour, M., & Mahian, O. (2021). Experimental Investigation Of The Microbubble Generation Using A Venturi-Type Bubble Generator. *Case Studies In Thermal Engineering*, 27(July), 101238. <https://doi.org/10.1016/j.csite.2021.101238>
- Sari, I. N., Lestari, L. P., Kusuma, D. W., Mafulah, S., Brata, D. P. N., Iffah, J. D. N., Widiatsih, A., Utomo, E. S., & Others. (2022). Metode Penelitian Kualitatif. Unisma Press. <https://books.google.co.id/books?id=Iczleaaaqbaj>
- Sriyana. (2020). Antropologi Sosial Budaya. Penerbit Lakeisha. <https://books.google.co.id/books?id=W9uheaaaqbaj>
- Wicaksana, S. A. (2021). Strategi Komunikasi Dakwah Komunitas Jaga Sesama Di Masjid Ar-Rochman Manahan Solo. <http://eprints.ums.ac.id/id/eprint/89011>
- Adiyoso, Wignyo. . Menggugat Perencanaan Partisipatif Dalam Pemberdayaan Masyarakat. Its Press, Surabaya., Tesis Agung Wihandoko, Persepsi Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (Pnpm Mandiri) Di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Studi Kasus Kecamatan Tanjungraya), 2009
- Babang Prasetyo, Lina Miftahudin J, Metode Penelitian Kualitatif, (Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Penetapan Kampung Menjadi Tiuh Di Kabupaten Tulang Bawang Barat
- Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2017
- Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Tulang
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa